

**AKSES KREDIT MIKRO BAGI PETANI MISKIN
DI KABUPATEN WAY KANAN**

TESIS

Oleh:

HARMADI
BP: 07206015



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

Akses Kredit Mikro Bagi Petani Miskin Di Kabupaten Way Kanan

Oleh : Harmadi

Dibawah bimbingan:

Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA

Fery Andrianus, SE, M.Si

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang disebabkan oleh banyak faktor, namun di Indonesia kemiskinan lebih merupakan fenomena perdesaan terutama pertanian. Hal yang sama juga dihadapi oleh Kabupaten Way Kanan, yaitu sebanyak 45,53% merupakan rumahtangga miskin dengan mayoritas penduduk tinggal dipedesaan dan bekerja disektor pertanian. Upaya mengurangi kemiskinan sebaiknya dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menjadi produktif. Akses terhadap jasa keuangan berkelanjutan memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, melakukan diversifikasi usaha, meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap tekanan ekonomi. Namun masyarakat miskin bukanlah komunitas yang homogen dan tidak semua dapat mengakses jasa keuangan mikro sehingga pemahaman mengenai masyarakat miskin sangat diperlukan untuk mengetahui bentuk pelayanan jasa keuangan mikro yang sesuai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan kondisi sosial ekonomi rumahtangga petani miskin terhadap akses kredit mikro di Kabupaten Way Kanan, dan menganalisis penyebab tidak diaksesnya kredit mikro oleh petani miskin di Kabupaten Way Kanan sehingga dapat dirumuskan kebijakan untuk pengurangan kemiskinan melalui peningkatkan akses kredit mikro. Metode penelitian dilakukan dengan survei terhadap 291 rumahtangga petani miskin di 4

(empat) kampung di Kabupaten Way Kanan, kemudian data yang diperoleh dianalisa dengan analisa deskriptif.

Hasil analisa menunjukkan bahwa sebanyak 85,22% rumah tangga petani miskin tidak mendapatkan akses kredit mikro untuk pengembangan usaha, dan hanya 2,75% petani miskin yang mengakses kredit mikro dari lembaga keuangan mikro formal yaitu bank umum. Lembaga keuangan mikro yang diakses petani miskin adalah lembaga keuangan mikro formal yaitu bank umum, lembaga keuangan mikro semiformal yaitu PPK, dan koperasi, dan lembaga keuangan mikro informal yaitu rentenir, arisan, saudara, dan sumber pembiayaan lainnya. Petani yang berstatus buruh tani, tidak memiliki lahan, ukuran keluarga 1-2 orang, cenderung tidak mengakses kredit mikro. Resiko usaha yang tinggi (70%), ketidaktahuan informasi dan prosedur (95,1%), dan biaya proses pengurusan kredit yang tinggi (83,8%) merupakan alasan utama yang dikemukakan responden sebagai penyebab mereka tidak mengakses kredit. Sehingga kebijakan yang disarankan untuk lembaga keuangan mikro adalah perluasan jangkauan pelayanan dan jangkauan informasi mengenai prosedur dan layanan bank lainnya, sedangkan petani untuk mengurangi resiko usaha melalui pembiayaan mandiri dan diversifikasi usaha, serta untuk pemerintah adalah merevitalisasi lembaga penyuluhan pertanian sehingga dapat lebih berperan dalam menyampaikan informasi baik mengenai teknologi pertanian, bisnis, maupun prosedur kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang disebabkan oleh banyak faktor dan masih menjadi masalah utama yang dihadapi Bangsa Indonesia sejak dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Masalah kemiskinan ini ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat, dan terjadinya ketimpangan antar wilayah terutama perkotaan dan perdesaan. Menurut BPS (2007), jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari jumlah penduduk Indonesia dimana sebagian besar (63,52%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Di Indonesia kemiskinan lebih merupakan fenomena perdesaan terutama pertanian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah orang miskin di Indonesia terdapat di perdesaan dan bekerja disektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani (Tambunan, 2006). Pembangunan perdesaan menghadapi berbagai masalah yaitu penurunan kualitas hidup, ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas, ketidakmampuan institusi ekonomi menyediakan kesempatan usaha, lapangan kerja yang terbatas, serta tingkat pendapatan yang rendah. Menurut World Bank (2008), konsentrasi akut kemiskinan baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif di wilayah-wilayah perdesaan menunjukkan betapa sulitnya proses redistribusi pendapatan yang dihasilkan di luar pertanian dan sangat lambannya transformasi pekerjaan di masyarakat sementara perekonomian terus mengalami restrukturisasi. Migrasi

keluar dari pertanian ke wilayah perkotaan seringkali terbentur oleh persoalan kurangnya informasi, biaya, minimnya keterampilan, usia tua, serta ikatan-ikatan kekeluargaan dan sosial.

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Lampung yang dibentuk pada 20 April 1999 dan salah satu dari 199 daerah tertinggal di Indonesia, juga menghadapi masalah yang sama dimana sebagian besar merupakan penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian dan tinggal di wilayah perdesaan. Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk pada tahun 2006, jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Way Kanan sebanyak 47.910 dari 105.225 rumah tangga yang ada, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah yaitu berkisar 4% dimana kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor pertanian.

Pemerintah telah berupaya mengurangi kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, dan pembangunan prasarana. Namun upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum efektif, tidak berkelanjutan (*sustainable*), dan kurang menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pengentasan hanya dilihat dari gejalanya dan bukan akar permasalahan dan sebab-sebabnya. Menurut Wijono (2005) upaya pengentasan kemiskinan sebaiknya dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk menjadi produktif.

Usaha memperbaiki produktifitas, profitabilitas dan keberlanjutan pertanian kecil merupakan jalan utama untuk keluar dari kemiskinan dalam

menggunakan pertanian untuk pembangunan. Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki akses ke jasa keuangan (World Bank, 2008). Jasa keuangan mikro merupakan alat yang efektif bagi proses pemberdayaan masyarakat dimana dengan keuangan mikro tersebut masyarakat dapat memiliki aset produktif yang membuat mereka dapat mandiri. Menurut Littlefield dan Rosenberg (2004), akses terhadap jasa keuangan berkelanjutan memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, melakukan diversifikasi usaha, meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap tekanan ekonomi. Keuangan mikro memungkinkan rumah tangga berpendapatan rendah untuk beralih dari sekedar perjuangan untuk bertahan hidup dari hari ke hari menuju perencanaan masa depan yang lebih baik, investasi untuk gizi yang lebih baik, peningkatan kondisi kehidupan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak.

Namun masyarakat miskin yang jumlahnya sangat besar, bukanlah komunitas yang homogen dan sampai saat ini masih terus kekurangan akses terhadap jasa keuangan mikro serta tidak semua masyarakat miskin dapat mengakses jasa keuangan mikro sehingga pemahaman mengenai masyarakat miskin dan sebab-sebab tidak dapat diaksesnya jasa keuangan mikro sangat diperlukan dalam penyusunan strategi dan mengetahui bentuk pelayanan keuangan mikro yang sesuai. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengkaji karakteristik dan kondisi sosial ekonomi petani miskin berkaitan dengan akses kredit mikro dan mengetahui sebab-sebab tidak teraksesnya kredit mikro oleh petani miskin di Kabupaten Way Kanan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah karakteristik dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani miskin berkaitan dengan akses kredit mikro,
2. Apakah alasan petani tidak mengakses kredit mikro bagi pengembangan usahanya,
3. Bagaimana implikasi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan melalui pengembangan kredit mikro di Kabupaten Way Kanan.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani miskin dalam mengakses kredit mikro di Kabupaten Way Kanan,
2. Menganalisis penyebab tidak diaksesnya kredit mikro oleh petani miskin di Kabupaten Way Kanan
3. Menyusun kebijakan dalam mengurangi kemiskinan melalui pengembangan keuangan mikro di Kabupaten Way Kanan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan relevansinya dengan tujuan penelitian seperti tersebut diatas, diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk:

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 85,22% rumah tangga petani miskin tidak mendapatkan akses kredit mikro untuk pengembangan usaha, dan hanya 2,75% petani miskin yang mengakses kredit mikro dari lembaga keuangan mikro formal yaitu bank umum. Lembaga keuangan mikro yang diakses petani miskin adalah lembaga keuangan mikro formal yaitu bank umum, lembaga keuangan mikro semiformal yaitu PPK, dan koperasi, dan lembaga keuangan mikro informal yaitu rentenir, arisan, saudara, dan sumber pembiayaan lainnya. Petani yang berstatus buruh tani, tidak memiliki lahan, ukuran keluarga 1-2 orang, cenderung tidak mengakses kredit mikro.
2. Kesamaan karakteristik dan kondisi sosial budaya tidak menunjukkan kesamaan dalam hal kemampuan dan kemauan mengakses kredit, hal ini terlihat pada: *pertama*, petani pemilik lahan dengan pendidikan SD kebawah merupakan petani dengan persentase tertinggi yang mengakses kredit sekaligus juga merupakan yang paling besar persentasenya tidak mendapatkan akses kredit; *kedua*, petani pemilik lahan yang bekerja di sektor perkebunan memiliki akses terbesar terhadap kredit sekaligus juga merupakan petani yang paling besar persentasenya tidak mendapatkan akses kredit; *ketiga*, petani pemilik lahan yang memiliki pekerjaan tambahan di

sektor pertanian memiliki akses terbesar terhadap kredit sekaligus juga merupakan petani yang paling besar persentasenya tidak mendapatkan akses kredit; *keempat*, petani pemilik lahan dengan luas lahan > 1 ha merupakan petani yang paling banyak mengakses kredit sekaligus juga merupakan petani paling banyak yang tidak mengakses kredit; *kelima*, petani pemilik lahan dengan ukuran keluarga 3-4 orang merupakan petani yang paling banyak mengakses kredit sekaligus merupakan petani yang paling banyak tidak mendapatkan akses kredit; *keenam*, petani pemilik lahan dengan pendapatan per kapita $> \text{Rp.154.379,-}$ merupakan petani yang paling banyak mengakses kredit sekaligus juga merupakan petani paling banyak yang tidak mendapatkan akses kredit.

3. Petani tidak mengakses kredit mikro disebabkan tidak sempurnanya informasi (*imperfect information*) mengenai prosedur dan layanan lembaga keuangan (95,1%) , tingginya resiko usaha (70%), dan tingginya biaya untuk mendapatkan kredit mikro (83,8%).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya peneliti mengajukan saran agar dilakukan upaya peningkatan akses kredit dengan cara mengurangi ketidaksetaraan informasi (*imperfect information*), mengurangi resiko usaha, dan mengurangi biaya proses termasuk menyederhanakan prosedur. Hal ini dapat dilakukan melalui peranan dari beberapa pihak yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln.** 2008. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Asian Development Bank,** 2000. *Finance For The Poor : Microfinance Development Strategy*. Manila: Asian Development Bank.
- Bank Indonesia.** 2008. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Lampung*, Vol. 8 No.9 September 2008. ISSN 1441 – 7339, Lampung: Bank Indonesia.
- Bastelaer, Thierry van.** 2000. *Imperfect Information, Social Capital, And The Poor's Access To Credit*. Maryland: Institut Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland.
- Badan Pusat Statistik.** 2007. *Data Dan Informasi Kemiskinan Tahun 2005-2006*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik.** 2007. *Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007*. Berita Resmi Statistik No.38/07/Th.X, 2 Juli 2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.** 2006. *Peta Kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006: Analisis Hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005*. Blambangan Umpu: Bapeda Kabupaten Way Kanan Bekerjasama Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.** 2007. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Way Kanan 2007*. Blambangan Umpu: Bapeda Kabupaten Way Kanan Bekerjasama Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.
- Budiman.** 2006. *Mikro Kredit Bagi Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Kasus*. Jakarta: Majalah Ekonomi dan Komputer No.2 Tahun XIV.
- Diagne, Aliou and Manfred Zeller.** 2001. *Access to Credit and Its Impact on Welfare in Malawi*. International Food Policy Research Institute.
- Elfindri, R. Riduan, D. Hendri, dan F. Rasmita.** 2008. *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Padang: Gorga Media.
- Evans, TG., Alayne M. Adams, Rafi Mohammed, and Alison H. Norris.** 1999. "Demystifying Nonparticipation in Microcredit: A Population-Based Analysis. *World Development*. Vol, 27, No,2 , pp. 419-430.
- Fernando, Nimal A.** 2004. "Microfinance Outreach to the Poorest: A Realistic Objective?" *Finance for the Poor. ADB Finance for the Poor* . Volume 5 Number 1, March 2004.